



KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN

Laporan Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tahun 2020

Kata Pengantar

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten

Balai Pengelola
Transportasi Darat
Wilayah VIII
Provinsi Banten
mengemban amanah
menjadi organisasi
pemerintah yang
profesional, yang
dapat memfasilitasi
dan mendukung
mobilitas
masyarakat, melalui
suatu layanan
transportasi darat.



Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020, Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2020.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Merak, 4 Januari 2021

**KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN**



ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19680110 199603 1 001

Ikhtisar Eksrekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview pada tahun 2020 sebanyak 35 Indikator dan 10 Sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Wilayah Provinsi Banten telah melaksanakan dengan baik. Disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target (kurang dari 100%) namu dalam kategori baik karena sudah mencapai 100%.

Hal ini menandakan capaian sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019.

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 3 |
| Ikhtisar Eksrekutif | 5 |
| Daftar Isi | 6 |
| BAB 1 | 7 |
| PENDAHULUAN..... | 7 |
| I.1. Latar Belakang | 8 |
| I.2. Tugas Pokok dan Fungsi..... | 10 |
| I.3. Sumber Daya Manusia | 11 |
| I.4. Potensi dan Permasalahan..... | 12 |
| I.4.1. Potensi | 12 |
| I.4.2 Permasalahan | 12 |
| I.5. Sistematika Laporan..... | 13 |
| BAB 3..... | 32 |
| AKUNTABILITAS..... | 32 |
| KINERJA | 32 |
| III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja | 33 |
| III.2. Pengukuran Capaian Kinerja..... | 34 |



BAB 1

PENDAHULUAN





I.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan guna mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-programnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mentransformasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak sebagai Unit Pelaksana Teknis yaitu menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat yang berada di Serang, Banten.

Setelah berganti nama menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten dan sebagai tindak lanjut terhadap Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2018 – 2020, maka disusun Rencana Strategis Dua Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2019 – 2020.

Dalam penyusunan Rencana Dua Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2019 – 2020 berpedoman kepada peraturan perundang – undangan antara lain :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang di usahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum di usahakan secara komersial.
- b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
 - 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
 - 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban,

- penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran
- 5) peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
 - 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai di BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten adalah sebanyak 335 orang dengan rincian 40 (Empat Puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 295 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) Tenaga Honorer (Non PNS) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

| No | Wilayah Kerja | PNS | Non PNS |
|-------|--------------------------------------|-----|---------|
| 1 | Kantor Induk Merak | 21 | 48 |
| 2 | Satpel Pelabuhan Penyeberangan Merak | 1 | 34 |
| 3 | Terminal Tipe A Merak | 3 | 64 |
| 4 | Terminal Tipe A Lebak | 4 | 28 |
| 5 | Terminal Tipe A Labuan | 4 | 32 |
| 6 | Terminal Tipe A Pakupatan | 4 | 67 |
| 7 | UPPKB Cikande | 1 | 15 |
| 8 | UPPKB Cimanuk | 2 | 7 |
| Total | | 40 | 295 |

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten

I.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam dua tahun kedepan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten. memetakan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi.

I.4.1. Potensi

Potensi yang dimiliki oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. VIII – Provinsi Banten yang meliputi 1 (satu) Provinsi yaitu Banten yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) provinsi membuat pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih fokus;
2. Adanya Penambahan sumber daya pegawai pada tahun 2017 yang berasal dari Pegawai Terminal Tipe A dan UPPKB;
3. Perkembangan teknologi baik peralatan dan informasi beserta personil yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi tersebut yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan mulai tahap perencanaan, pembangunan serta pemeliharaan.

I.4.2 Permasalahan

Terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lima tahun kedepan yaitu:

1. Eksistensi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten belum tersosialisasi secara maksimal ke seluruh SKPD yang ada di wilayah kerja.
2. Belum adanya kejelasan pendelegasian kewenangan sesuai dengan PM 154 Tahun 2016 dari Direktorat Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten;
3. Keterbatasan jumlah SDM baik ASN maupun PNPB Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan bidang LLAJ, TSDP termasuk tupoksi – tupoksi lainnya;
4. Masih rangkap fungsi dan kewenangan PT ASDP sebagai operator dan regulator sehingga menjadi kendala Balai Pengelola Transportasi Darat

Wilayah VIII Provinsi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di Pelabuhan Penyeberangan;

5. Belum adanya keterpaduan pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan dikarenakan masih belum maksimalnya koordinasi antar instansi pemangku kepentingan di bidang transportasi;
6. Tidak adanya keterpaduan pelayanan antar moda darat, laut dan udara.
7. Karakteristik batas wilayah administratif Kabupaten/Kota relatif pendek sehingga menimbulkan biaya transportasi yang tinggi dan pelayanan angkutan umum tidak maksimal.
8. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur pelayanan sungai, danau dan sebagai batas administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta belum adanya buku petunjuk pelayaran di sungai dan danau.
9. Belum adanya penetapan jaringan lintas angkutan barang, sehingga menimbulkan kerusakan jalan, tinggi angka kecelakaan, kemacetan dan tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

I.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknik perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri perhubungan nomor PM Nomor 45 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kementerian perhubungan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Kementerian Perhubungan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten pada tahun 2020 yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja tahun 2020 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh selama tahun 2020 yang terdiri dari :

- a. Analisis pencapaian kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja unit kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan dan hambatan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan. Dalam hal ini dapat dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut.
- b. Aspek keuangan menguraikan sumber perolehan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Aspek keuangan harus memperhatikan prinsip – prinsip pelaporan keuangan yang lazim.

4. BAB IV PENUTUP

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja (Termasuk Struktur Organisasi, Sasaran Strategis Unit Kerja)
- I.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan (Termasuk Ruang Lingkup)
- I.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Lampiran II. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran III. Revisi Perjanjian Kerja Tahun 2020

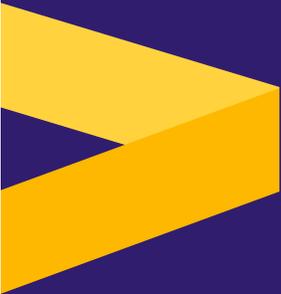


BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA





II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tantangan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Melalui pendekatan Renstra yang transparan dan sinergi, instansi pemerintah dapat memaduserasikan visi, misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerjanya.



Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat 2020 sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020.

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET 2020 | CAPAIAN 2020 |
|-----|---|--|--------|-------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru | lokasi | - | - |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan | lokasi | - | - |
| | | c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A | lokasi | - | - |
| | | d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) | unit | - | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) | lokasi | - | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) | lokasi | - | - |
| | | g. Jumlah Lokasi | lokasi | - | - |

| | | | | |
|--|---|---------|--------|--------|
| | Rehabilitasi UPPKB | | | |
| | h. Pengadaan Lahan UPPKB | lokasi | - | - |
| | IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | laporan | 1 | 1 |
| | IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020 | | | |
| | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab) | lokasi | 7 | 7 |
| | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab) | lokasi | | |
| | c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan | lokasi | - | - |
| | IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri | laporan | 1 | 1 |
| | IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor | bahan | 1 | 1 |
| | IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | | | |
| | a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | | | |
| | • Marka Jalan | m' | 34.263 | 34.263 |
| | • Rambu Lalu Lintas | buah | 330 | 330 |
| | • Patok Lalu Lintas | buah | 250 | 250 |
| | • Paku Jalan | buah | - | - |

| | | | | |
|--|---|--------|-----|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pagar Pengaman Jalan | Unit | 35 | 35 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 | 208 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Cermin Tikungan | buah | 16 | 16 |
| | b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 | 208 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - | - |
| | c. Jumlah Paket ATCS (baru) | paket | - | - |
| | d. Pengembangan Transportasi Perkotaan | lokasi | - | - |
| | e. Pengadaan Bus | unit | - | - |
| | f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | trayek | 5 | 5 |
| | g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis | paket | - | - |
| | IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan | Lokasi | 3 | 3 |
| | IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial | | | |
| | a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air | unit | - | - |
| | b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru | unit | - | - |
| | c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan | unit | - | - |
| | d. Jumlah Lokasi | lokasi | - | - |

| | | | | | |
|----|--|--|---------|---|---|
| | | Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | | | |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan | lokasi | - | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan | lokasi | - | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru | lokasi | - | - |
| | | h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan | lokasi | - | - |
| | | i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai | lokasi | - | - |
| | | j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru | lokasi | - | - |
| | | k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan | lokasi | - | - |
| | | l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau | lokasi | - | - |
| | | m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) | lokasi | - | - |
| | | n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | unit | - | - |
| | | o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau | unit | - | - |
| | | p. Jumlah Unit Halte Sungai | unit | - | - |
| | | q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan | paket | - | - |
| 2. | Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan | laporan | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------|---|---|
| | | IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A | bahan | 1 | 1 |
|--|--|---|-------|---|---|

II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru | lokasi | - |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan | lokasi | - |
| | | c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A | lokasi | - |
| | | d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) | unit | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) | lokasi | - |

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| | f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) | lokasi | - |
| | g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB | lokasi | - |
| | h. Pengadaan Lahan UPPKB | lokasi | - |
| | IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | laporan | 1 |
| | IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020 | | |
| | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab) | lokasi | 7 |
| | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab) | lokasi | |
| | c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan | lokasi | - |
| | IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri | laporan | 1 |
| | IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor | bahan | 1 |
| | IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | | |
| | a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | | |
| | • Marka Jalan | m' | 34.263 |
| | • Rambu Lalu Lintas | buah | 330 |

| | | | |
|--|---|--------|-----|
| | • Patok Lalu Lintas | buah | 250 |
| | • Paku Jalan | buah | - |
| | • Pagar Pengaman Jalan | Unit | 35 |
| | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | • Cermin Tikungan | buah | 16 |
| | b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | |
| | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | c. Jumlah Paket ATCS (baru) | paket | - |
| | d. Pengembangan Transportasi Perkotaan | lokasi | - |
| | e. Pengadaan Bus | unit | - |
| | f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | trayek | 5 |
| | g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis | paket | - |
| | IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan | Lokasi | 3 |
| | IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial | | |
| | a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air | unit | - |
| | b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru | unit | - |
| | c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal | unit | - |

| | | | | |
|----|--|---|---------|---|
| | | Penyeberangan Perintis Lanjutan | | |
| | | d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | lokasi | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan | lokasi | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru | lokasi | - |
| | | h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan | lokasi | - |
| | | i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai | lokasi | - |
| | | j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru | lokasi | - |
| | | k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan | lokasi | - |
| | | l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau | lokasi | - |
| | | m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) | lokasi | - |
| | | n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | unit | - |
| | | o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau | unit | - |
| | | p. Jumlah Unit Halte Sungai | unit | - |
| | | q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan | paket | - |
| 2. | Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di | IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, | laporan | 1 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------|---|
| | Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan | | |
| | | IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A | bahan | 1 |

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pada konteks implementasi LKIP, Perjanjian Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (annual performance plan) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2017-2019, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif).

Maksud Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten tahun 2020 adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam berjalannya Tahun Anggaran 2020 terdapat 1 (satu) kali Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten pada Semester ke-II. Untuk mewujudkan Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2017-2019.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2020

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan | | |

| | | | | |
|--|-------|---|---------|---|
| | | pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru | lokasi | - |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan | lokasi | - |
| | | c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A | lokasi | - |
| | | d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) | unit | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) | lokasi | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB | lokasi | - |
| | | h. Pengadaan Lahan UPPKB | lokasi | - |
| | IKK 2 | Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | laporan | 1 |
| | IKK 3 | Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020 | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab) | lokasi | 7 |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab) | lokasi | |
| | | c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan | lokasi | - |

| | | | |
|--|--|---------|--------|
| | IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri | laporan | 1 |
| | IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor | bahan | 1 |
| | IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | | |
| | a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | | |
| | • Marka Jalan | m' | 34.263 |
| | • Rambu Lalu Lintas | buah | 330 |
| | • Patok Lalu Lintas | buah | 250 |
| | • Paku Jalan | buah | - |
| | • Pagar Pengaman Jalan | Unit | 35 |
| | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | • Cermin Tikungan | buah | 16 |
| | b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | |
| | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | c. Jumlah Paket ATCS (baru) | paket | - |
| | d. Pengembangan Transportasi Perkotaan | lokasi | - |
| | e. Pengadaan Bus | unit | - |
| | f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | trayek | 5 |

| | | | | |
|--|--|---|--------|---|
| | | g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis | paket | - |
| | | IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan | Lokasi | 3 |
| | | IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial | | |
| | | a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air | unit | - |
| | | b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru | unit | - |
| | | c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan | unit | - |
| | | d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | lokasi | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan | lokasi | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru | lokasi | - |
| | | h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan | lokasi | - |
| | | i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai | lokasi | - |
| | | j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru | lokasi | - |

| | | | | |
|----|--|--|---------|---|
| | | k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan | lokasi | - |
| | | l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau | lokasi | - |
| | | m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) | lokasi | - |
| | | n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | unit | - |
| | | o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau | unit | - |
| | | p. Jumlah Unit Halte Sungai | unit | - |
| | | q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan | paket | - |
| 2. | Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan | laporan | 1 |
| | | IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A | bahan | 1 |



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA



III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten melalui aplikasi E-performance dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi E-Performance yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten.

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama:

1. Prosentase pengukuran IKU (Unit)
 - a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Realisasi a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \text{ a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

2. Rata-rata nilai capaian IKU terhadap Sasaran (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

3. Rata-rata nilai capaian seluruh IKU yang dilaksanakan (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan pendanaan. Untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten 2017-2019, bermuara pada terwujudnya tujud Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai pada periode 2019-2021.

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Revisi PK 2020 | Realisasi 2020 | % | Capaian Triwulan | | | |
|-----|---|---|--------|-----------------------------|-------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | Tw. 1 | Tw. 2 | Tw. 3 | Tw. 4 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | 1. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | | | | | | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru | lokasi | - | - | | | | | |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan | lokasi | - | - | | | | | |
| | | c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A | lokasi | - | - | | | | | |
| | | d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) | unit | - | - | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|------|--|--|---|---|
| | e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) | lokasi | - | - | | | | | |
| | f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) | lokasi | - | - | | | | | |
| | g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB | lokasi | - | - | | | | | |
| | h. Pengadaan Lahan UPPKB | lokasi | - | - | | | | | |
| | 2. Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | laporan | 1 | 1 | 100% | | | | v |
| | 3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020 | | | | | | | | |
| | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab) | lokasi | 7 | 7 | 100% | | | v | |
| | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab) | lokasi | | | | | | | |
| | c. Jumlah Lokasi | lokasi | - | - | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--------|--------|------|--|---|---|
| | | Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan | | | | | | | |
| | | 4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri | laporan | 1 | 1 | 100% | | | v |
| | | 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor | bahan | 1 | 1 | 100% | | v | |
| | | 6. Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | | | | | | | |
| | | a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | | | | | | V | |
| | | • Marka Jalan | m' | 34.263 | 34.263 | 100% | | | |
| | | • Rambu Lalu Lintas | buah | 330 | 330 | 100% | | | |
| | | • Patok Lalu Lintas | buah | 250 | 250 | 100% | | | |
| | | • Paku Jalan | buah | - | - | | | | |
| | | • Pagar Pengaman Jalan | Unit | 35 | 35 | 100% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----|-----|------|---|---|---|---|
| | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 | 208 | 100% | | | | |
| | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - | - | | | | | |
| | • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - | - | | | | | |
| | • Cermin Tikungan | buah | 16 | 16 | 100% | | | | |
| | b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | v | |
| | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 | 208 | 100% | | | | |
| | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - | - | | | | | |
| | • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - | - | | | | | |
| | c. Jumlah Paket ATCS (baru) | paket | - | - | | | | | |
| | d. Pengembangan Transportasi Perkotaan | lokasi | - | - | | | | | |
| | e. Pengadaan Bus | unit | - | - | | | | | |
| | f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | trayek | 5 | 5 | 100% | v | v | v | V |
| | g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis | paket | - | - | | | | | |
| | 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan | Lokasi | 3 | 3 | 100% | | | V | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|--|--|--|--|
| | | jalan | | | | | | | |
| | | 8. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang yang belum diusahakan secara komersial | | | | | | | |
| | | a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air | unit | - | - | | | | |
| | | b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru | unit | - | - | | | | |
| | | c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan | unit | - | - | | | | |
| | | d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | lokasi | - | - | | | | |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan | lokasi | - | - | | | | |
| | | f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan | lokasi | - | - | | | | |
| | | g. Jumlah Lokasi | lokasi | - | - | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru | | | | | | | | |
| | | h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan | lokasi | - | - | | | | | |
| | | i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai | lokasi | - | - | | | | | |
| | | j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru | lokasi | - | - | | | | | |
| | | k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan | lokasi | - | - | | | | | |
| | | l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau | lokasi | - | - | | | | | |
| | | m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) | lokasi | - | - | | | | | |
| | | n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | unit | - | - | | | | | |
| | | o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau | unit | - | - | | | | | |
| | | p. Jumlah Unit Halte Sungai | unit | - | - | | | | | |
| | | q. Jumlah Paket Pengerukan | paket | - | - | | | | | |

| | | Kolam Pelabuhan | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|---|---|------|---|---|---|---|
| 9. | Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | 10. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan | laporan | 1 | 1 | 100% | v | v | V | V |
| | | 11. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A | bahan | 1 | 1 | 100% | | | V | |

Tabel III.2.1 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Capaian Tahun 2020 | | % |
|---|---------|-----------------------|----------------------|------|
| | | Target Revisi PK 2020 | Realisasi Tahun 2020 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | | | |
| a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru | lokasi | - | - | |
| b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan | lokasi | - | - | |
| c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A | lokasi | - | - | |
| d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) | unit | - | - | |
| e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) | lokasi | - | - | |
| f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) | lokasi | - | - | |
| g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB | lokasi | - | - | |
| h. Pengadaan Lahan UPPKB | lokasi | - | - | |
| 2. Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | laporan | 1 | 1 | 100% |
| 3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana | | | | |

| | | | | |
|---|---------|--------|--------|------|
| penerapan sampai dengan tahun 2020 | | | | |
| a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab) | lokasi | 7 | 7 | 100% |
| b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab) | lokasi | | | |
| c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan | lokasi | - | - | |
| 4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri | laporan | 1 | 1 | 100% |
| 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor | bahan | 1 | 1 | 100% |
| 6. Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | | | | |
| a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | | | | |
| • Marka Jalan | m' | 34.263 | 34.263 | 100% |
| • Rambu Lalu Lintas | buah | 330 | 330 | 100% |
| • Patok Lalu Lintas | buah | 250 | 250 | 100% |
| • Paku Jalan | buah | - | - | |
| • Pagar Pengaman Jalan | Unit | 35 | 35 | 100% |
| • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 | 208 | 100% |
| • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - | - | |
| • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - | - | |
| • Cermin Tikungan | buah | 16 | 16 | 100% |
| b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | |
| • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 | 208 | 100% |
| • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - | - | |
| • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - | - | |
| c. Jumlah Paket ATCS (baru) | paket | - | - | |
| d. Pengembangan Transportasi | lokasi | - | - | |

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| Perkotaan | | | | |
| e. Pengadaan Bus | unit | - | - | |
| f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | trayek | 5 | 5 | 100% |
| g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis | paket | - | - | |
| 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan | Lokasi | 3 | 3 | 100% |
| 8. Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang yang belum diusahakan secara komersial | | | | |
| a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air | unit | - | - | |
| b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru | unit | - | - | |
| c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan | unit | - | - | |
| d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | lokasi | - | - | |
| e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan | lokasi | - | - | |
| f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan | lokasi | - | - | |
| g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru | lokasi | - | - | |
| h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan | lokasi | - | - | |
| i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai | lokasi | - | - | |
| j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru | lokasi | - | - | |
| k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan | lokasi | - | - | |
| l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ | lokasi | - | - | |

| | | | | |
|---|---------|---|---|------|
| Rehabilitasi Pelabuhan Danau | | | | |
| m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) | lokasi | - | - | |
| n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | unit | - | - | |
| o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau | unit | - | - | |
| p. Jumlah Unit Halte Sungai | unit | - | - | |
| q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan | paket | - | - | |
| 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan | laporan | 1 | 1 | 100% |
| 10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A | bahan | 1 | 1 | 100% |

III.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Revisi PK Tahun 2020

Selama tahun 2020, ada 10 SS dan di dalamnya ada 35 IK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten merupakan Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat di Wilayah Provinsi Banten yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2017-2019. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam ikut membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan

mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas.



Sasaran Strategis 1

Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Pencapaian SS 1 diukur melalui sepuluh Indikator Kinerja (IK) yaitu,

IK 1. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru

Capaian lokasi pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK tahun 2020 maka capaian Kinerja Mencapai 100%.

IK 2. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan

Capaian Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK 3. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A

Capaian Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK 4. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)

Capaian Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.5 Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru)

Capaian Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.6 Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan)

Capaian Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.7 Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB

Capaian Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.8 Pengadaan Lahan UPPKB

Capaian Pengadaan Lahan UPPKB tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%



Sasaran Strategis 2

Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Pencapaian SS 2 yaitu evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) tahun 2020 sebesar 1 Laporan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebesar 1 Laporan maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 3

Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020

Pencapaian SS 3 diukur melalui tiga Indikator Kinerja (IK) yaitu

IK.8 Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)

Capaian lokasi pembangunan ZOSS tahun 2020 sebanyak 7 jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 7 maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.9 Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)

Capaian lokasi Pembangunan RASS tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.10 Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan

Capaian lokasi pembangunan implementasi batas kecepatan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 4

Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri

Pencapaian SS 4 yaitu evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri tahun 2020 sebesar 1 Laporan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebesar 1 Laporan maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 5

Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor

Pencapaian SS 5 yaitu bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor tahun 2020 sebesar 1 Laporan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebesar 1 Laporan maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 6

Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan

Pencapaian SS 6 diukur melalui tujuh Indikator Kinerja (IK) yaitu

IK.11 Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

a. Marka Jalan

Capaian Marka Jalan tahun 2020 sebesar 34.263 m' jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebesar 34.263 m' maka capaian kinerja mencapai 100%.

b. Rambu Lalu Lintas

Capaian Rambu lalu lintas tahun 2020 sebanyak 330 buah jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 330 buah maka capaian kinerja mencapai 100%.

c. Patok Lalu Lintas

Capaian Patok lalu lintas tahun 2020 sebanyak 250 buah jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 250 buah maka capaian kinerja mencapai 100%.

d. Paku Jalan

Capaian Patok lalu lintas tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

e. Pagar Pengaman Jalan

Capaian pagar pengaman jalan tahun 2020 sebanyak 35 unit jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 35 unit maka capaian kinerja mencapai 100%.

f. Alat Penerangan Jalan

Capaian alat penerangan jalan tahun 2020 sebanyak 208 unit jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 208 unit maka capaian kinerja mencapai 100%.

g. Lampu Peringatan Pemakai Jalan

Capaian lampu peringatan pemakai jalan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

h. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Capaian alat pemberi isyarat lalu lintas tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

i. Cermin Tikungan

Capaian cermin tikungan tahun 2020 sebanak 16 buah jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 16 buah maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.12 Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

a. Alat Penerangan Jalan

Capaian alat penerangan jalan tahun 2020 sebanyak 208 unit jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 208 unit maka capaian kinerja mencapai 100%.

b. Lampu Peringatan Pemakai Jalan

Capaian lampu peringatan pemakai jalan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Capaian alat pemberi isyarat lalu lintas tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.13 Jumlah Paket ATCS (baru)

Capaian alat pemberi isyarat lalu lintas tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.14 Pengembangan Transportasi Perkotaan

Capaian pengembangan transportasi perkotaan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.15 Pengadaan Bus

Capaian pengadaan Bus tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.16 Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan

Capaian subsidi operasional keperintisan Angkutan Jalan tahun 2020 sebanyak 5 trayek jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 5 trayek maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.17 Dukungan Terhadap Pengembangan Aeropolis

Capaian dukungan terhadap aeropolis tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 7

Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan

Pencapaian SS 7 yaitu kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan tahun 2020 sebanyak 3 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 3 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 8

Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial

Pencapaian SS 8 diukur melalui tujuh Indikator Kinerja (IK) yaitu

IK.18 Jumlah Unit Pembangunan Bus Air

Capaian Unit pembangunan Bus air tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.19 Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru

Capaian unit pembangunan kapal penyeberangan perintis baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.20 Jumlah Lokasi Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan

Capaian lokasi pembangunan kapal penyeberangan perintis lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.21 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.22 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.23 Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

Capaian lokasi rehabilitasi pelabuhan penyeberangan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.24 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan sungai baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.25 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan sungai lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.26 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan danau baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.27 Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan

Capaian lokasi pembangunan pelabuhan danau lanjutan tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.28 Jumlah Lokasi Peningkatan/Rehabilitasi Pelabuhan Danau

Capaian lokasi peningkatan/rehabilitasi pelabuhan danau baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.29 Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas)

Capaian subsidi operasional keperintisan angkutan SDP tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.30 Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Capaian unit sarana bantu navigasi pelayaran tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.31 Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau

Capaian unit pengadaan rambu sungai danau baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.32 Jumlah Unit Halte Sungai

Capaian unit halte sungai baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.

IK.33 Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan

Capaian paket pengerukan kolam pelabuhan baru tahun 2020 tidak ada jika dibandingkan dengan target PK 2020 tidak ada maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 9

Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan

Pencapaian SS 9 yaitu Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan tahun 2020 sebanyak 1 laporan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 1 laporan maka capaian kinerja mencapai 100%.



Sasaran Strategis 10

Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A

Pencapaian SS 10 yaitu Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A tahun 2020 sebanyak 3 bahan jika dibandingkan dengan target PK 2020 sebanyak 3 bahan maka capaian kinerja mencapai 100%.

Nilai Aset Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten yang berhasil diinventarisasi.

Hingga Desember 2020 Nilai Aset pada Neraca Unaudited 2020 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 186.512.054.491.

III.2.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis Efisiensi Sumber Daya Kami sajikan dalam Tabel berikut :

| NO. | KEGIATAN | Pagu (Rp.) | Realisasi Keuangan | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | Realisasi (Rp.) | Sisa Realisasi (Rp.) | % Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan | Rp. 19.454.050.000 | Rp. 19.454.050.000 | - | 100% |
| 2. | Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan | Rp. 2.931.732.000 | Rp. 2.931.732.000 | - | 100% |
| 3. | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan | Rp. 12.650.228.000 | Rp. 12.650.228.000 | - | 100% |
| 4. | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan | Rp. 3.003.000.000 | Rp. 3.003.000.000 | - | 100% |
| 5. | Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi | Rp. 1.698.025.000 | Rp. 1.698.025.000 | - | 100% |

| NO. | KEGIATAN | Pagu (Rp.) | Realisasi Keuangan | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | | Realisasi (Rp.) | Sisa Realisasi (Rp.) | % Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Sungai, Danau, dan Penyeberangan | | | | |
| 6. | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat | Rp. 34.362.428.000 | Rp. 34.362.428.000 | - | 100% |

III.3. Capaian Kinerja Lainnya

Kontribusi dalam membantu penanganan pandemi covid-19 sesuai arahan Bapak Dirjen Perhubungan Darat untuk memberikan upaya pencegahan penyebaran covid-19, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- a. pembagian 1000 masker kepada pengguna jasa
- b. bantuan covid-19 berupa bansos sembako 200 unit sembako.

Semua bantuan sudah disalurkan melalui masing-masing satuan pelayanan baik terminal, UPPKB maupun pelabuhan, dengan sinergi dan kerja sama seluruh pegawai BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten dan seluruh Jajaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersinergi membantu dalam mencegah penyebaran covid-19.

III.4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Utama dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target.

III.4.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2020

Alokasi Anggaran Tahun 2018

a. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2018 sebesar Rp. 74.099.463.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian per Sumber Dana :

| | | | | |
|------|---|-----|-------------------------|------|
| RM | : | Rp. | 76.096.463.000,- | 100% |
| PNBP | : | Rp. | 3.003.000.000 | 0% |
| PLN | : | Rp. | - | 0% |

2) Pagu setelah Efisiensi dan Penambahan Pagu T.A. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1. | Pagu Awal (DIPA) | Rp. | 74.099.463.000 |
| 2. | Penambahan | Rp. | 387.191.000 |
| 3. | Penambahan a. Perencanaan Teknis | Rp. | 387.191.000 |
| 4. | Pagu Akhir (DIPA) | Rp. | 76.096.463.000 |

Rincian per Jenis Belanja :

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| Belanja Pegawai | Rp. 4.940.105.390,- | 96,81% |
| Belanja Barang | Rp. 35.954.086.216,- | 98,79% |
| Belanja Modal | Rp. 32.512.853.054 | 98,56% |

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi) :

| | | |
|---|-----|----------------|
| Pembangunan dan pengelolaan lalu lintas jalan | Rp. | 19.248.035.072 |
| Pembangunan dan pengelolaan angkutan jalan | Rp. | 2.410.728.000 |
| Pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi jalan | Rp. | 13.586.791.120 |
| Pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi jalan | Rp. | 2.813.503.850 |
| Pembangunan dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan | Rp. | 1.787.139.350 |
| Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen pwehubungan darat | Rp. | 33.561.357.268 |

II.4.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Dana tidak terserap TA. 2020 di ai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Bantensebesar Rp. 1.079.609.340 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan tidak dilaksanakan/tidak diserap, antara lain :

1. Pembangunan dan pengelolaan lalu lintas jalan Rp. 560.459.928
2. Pembangunan dan pengelolaan angkutan jalan Rp. 510.000
3. Pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi jalan Rp. 63.436.880
4. Pembangunan dan pengelolaan sarana transportasi jalan Rp. 189.496.150

5. Pembangunan dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan Rp. 10.885.650
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen pwehubungan darat Rp. 254.820.732

III.4.3.Hambatan dan Kendala

Dikarenakan :

1. sisa kontrak tidak bisa di efisiensi
2. terlambat melakukan revisi anggaran.



BAB 4

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Sebagai penutup dari LKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2017-2019, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2020 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten akan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.

RENCANA KINERJA

TAHUNAN

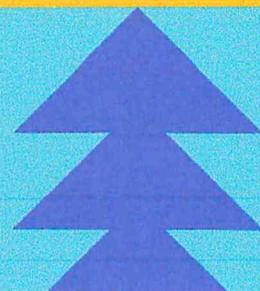
2020



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT**

Balai Pengelola Transportasi
Daerah (BPTD)

**Wilayah VIII
Provinsi Banten**



RENCANA KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VIII
PROVINSI BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|------------|---|--|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru | lokasi | - |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan | lokasi | - |
| | | c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A | lokasi | - |
| | | d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) | unit | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) | lokasi | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB | lokasi | - |
| | | h. Pengadaan Lahan UPPKB | lokasi | - |
| | | IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit | laporan | 1 |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---------------------------|--|---------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | |
| | | IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020 | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab) | lokasi | 7 |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab) | lokasi | |
| | | c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan | lokasi | - |
| | | IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri | laporan | 1 |
| | | IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor | bahan | 1 |
| | | IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | | |
| | | a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | | |
| | | • Marka Jalan | m' | 34.263 |
| | | • Rambu Lalu Lintas | buah | 330 |
| | | • Patok Lalu Lintas | buah | 250 |
| | | • Paku Jalan | buah | - |
| | | • Pagar Pengaman Jalan | m' | 35 |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Cermin Tikungan | buah | 16 |
| | | b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | | c. Jumlah Paket ATCS (baru) | paket | - |
| | | d. Pengembangan Transportasi Perkotaan | lokasi | - |
| | | e. Pengadaan Bus | unit | - |
| | | f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | trayek | 5 |
| | | g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis | paket | - |
| | | IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan | Lokasi | 3 |
| | | IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial | | |
| | | a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air | unit | - |
| | | b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru | unit | - |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---------------------------|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan | unit | - |
| | | d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | lokasi | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan | lokasi | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru | lokasi | - |
| | | h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan | lokasi | - |
| | | i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai | lokasi | - |
| | | j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru | lokasi | - |
| | | k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan | lokasi | - |
| | | l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau | lokasi | - |
| | | m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) | lokasi | - |
| | | n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | unit | - |
| | | o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau | unit | - |
| | | p. Jumlah Unit Halte Sungai | unit | - |

| NO. | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|--|--|---------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan | paket | - |
| 2. | Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan | laporan | 1 |
| | | IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A | bahan | 1 |

Merak, 2 Januari 2020

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten



ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680110 199603 1 001



**DIREKTORAT
JENDERAL
PERHUBUNGAN
DARAT**



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Merak, 2 Januari 2020

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

NURHADI UNGGUL W., ST, MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19711116 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|------------|---|--|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru | lokasi | - |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan | lokasi | - |
| | | c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A | lokasi | - |
| | | d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) | unit | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) | lokasi | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB | lokasi | 1 |
| | | h. Pengadaan Lahan UPPKB | lokasi | - |
| | | IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | laporan | 1 |
| | | IKK 3 Terlaksananya penerapan | | |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---------------------------|--|---------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020 | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab) | lokasi | 7 |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab) | lokasi | 7 |
| | | c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan | lokasi | - |
| | | IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri | laporan | 3 |
| | | IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor | bahan | 1 |
| | | IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | | |
| | | a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | | |
| | | • Marka Jalan | m' | 34.263 |
| | | • Rambu Lalu Lintas | buah | 330 |
| | | • Patok Lalu Lintas | buah | 250 |
| | | • Paku Jalan | buah | - |
| | | • Pagar Pengaman Jalan | unit | 35 |
| | | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | | • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | | • Rambu Peringatan Pengguna Jalan | buah | 16 |
| | | b. Jumlah Pemeliharaan | | |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Perlengkapan Jalan | | |
| | | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | | • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | | c. Jumlah Paket ATCS (baru) | paket | - |
| | | d. Pengembangan Transportasi Perkotaan | lokasi | - |
| | | e. Pengadaan Bus | unit | - |
| | | f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | trayek | 5 |
| | | g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis | paket | - |
| | | IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan | Lokasi | 3 |
| | | IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial | | |
| | | a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air | unit | - |
| | | b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru | unit | - |
| | | c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan | unit | - |
| | | d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | lokasi | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan | lokasi | - |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|--|--|---------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Penyeberangan | | |
| | | g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru | lokasi | - |
| | | h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan | lokasi | - |
| | | i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai | lokasi | - |
| | | j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru | lokasi | - |
| | | k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan | lokasi | - |
| | | l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau | lokasi | - |
| | | m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) | lokasi | - |
| | | n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | unit | - |
| | | o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau | unit | - |
| | | p. Jumlah Unit Halte Sungai | unit | - |
| | | q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan | paket | - |
| 2. | Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan | laporan | 1 |
| | | IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A | bahan | 1 |

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|------------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan | Rp. 19.454.050.000 |
| 2. | Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan | Rp. 2.931.732.000 |
| 3. | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan | Rp. 12.650.228.000 |
| 4. | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan | Rp. 3.003.000.000 |
| 5. | Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Rp. 1.698.025.000 |
| 6. | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat | Rp. 34.362.428.000 |

Merak , 2 Januari 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784


NURHADI UNGGUL W., ST, MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19711116 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN**

2020





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH VIII PROVINSI BANTEN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Merak, 1 September 2020

Pihak Pertama

ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680110 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---|--|---------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | IKK 1 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, SMART Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Baru | lokasi | - |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A Lanjutan | lokasi | - |
| | | c. Jumlah Lokasi Revitalisasi Terminal penumpang Tipe A | lokasi | - |
| | | d. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB) | unit | - |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (baru) | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Pembangunan UPPKB (lanjutan) | lokasi | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Rehabilitasi UPPKB | lokasi | - |
| | | h. Pengadaan Lahan UPPKB | lokasi | - |
| | | IKK 2 Tersusunnya evaluasi pengawasan, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan | laporan | 1 |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---------------------------|--|---------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Kendaraan Bermotor (UPPKB) | | |
| | | IKK 3 Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2020 | | |
| | | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab) | lokasi | 7 |
| | | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab) | lokasi | 7 |
| | | c. Jumlah Lokasi Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan | lokasi | - |
| | | IKK 4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, dan industri karoseri | laporan | 1 |
| | | IKK 5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor | bahan | 1 |
| | | IKK 6 Tersusunnya pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | | |
| | | a. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | | |
| | | • Marka Jalan | m' | 34.263 |
| | | • Rambu Lalu Lintas | buah | 330 |
| | | • Patok Lalu Lintas | buah | 250 |
| | | • Paku Jalan | buah | - |
| | | • Pagar Pengaman Jalan | unit | 35 |
| | | • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | | • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|---------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Rambu Peringatan Pengguna Jalan | buah | 16 |
| | | b. Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Penerangan Jalan | unit | 208 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Lampu Peringatan Pemakai Jalan | unit | - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | paket | - |
| | | c. Jumlah Paket ATCS (baru) | paket | - |
| | | d. Pengembangan Transportasi Perkotaan | lokasi | - |
| | | e. Pengadaan Bus | unit | - |
| | | f. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | trayek | 5 |
| | | g. Dukungan terhadap pengembangan aeropolis | paket | - |
| | | IKK 7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan | Lokasi | 3 |
| | | IKK 8 Tersusunnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial | | |
| | | a. Jumlah Unit Pembangunan Bus Air | unit | - |
| | | b. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru | unit | - |
| | | c. Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Lanjutan | unit | - |
| | | d. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | lokasi | - |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|-----|--|--|---------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | e. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan | lokasi | - |
| | | f. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan | lokasi | - |
| | | g. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru | lokasi | - |
| | | h. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan | lokasi | - |
| | | i. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Sungai | lokasi | - |
| | | j. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Baru | lokasi | - |
| | | k. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan | lokasi | - |
| | | l. Jumlah Lokasi Peningkatan/ Rehabilitasi Pelabuhan Danau | lokasi | - |
| | | m. Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) | lokasi | - |
| | | n. Jumlah Unit Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | unit | - |
| | | o. Jumlah Unit Pengadaan Rambu Sungai Danau | unit | - |
| | | p. Jumlah Unit Halte Sungai | unit | - |
| | | q. Jumlah Paket Pengerukan Kolam Pelabuhan | paket | - |
| 2. | Meningkatkan dukungan Sumber Daya Dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | IKK 9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK kantor, pengarsipan | laporan | 1 |
| | | IKK 10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring | bahan | 1 |

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|------------|----------------------------------|--|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A | | |

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|------------|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan | Rp. 19.454.050.000 |
| 2. | Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan | Rp. 2.931.732.000 |
| 3. | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan | Rp. 12.650.228.000 |
| 4. | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan | Rp. 3.003.000.000 |
| 5. | Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Rp. 1.698.025.000 |
| 6. | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat | Rp. 34.362.428.000 |

Merak, 1 September 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

ENDI SUPRASETIO, ST, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680110 199603 1 001